



Kemenkes
BKK Merauke



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025



www.bkkmerauke.com



kkpmrk@gmail.com



082199224855 / (0971) 330263



Jl. Prajurit Merauke

KATA PENGANTAR

Dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 merupakan tahun awal periode perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dan perencanaan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029. Memasuki tahun awal tersebut kita dihadapkan pada situasi peralihan pemerintahan sesuai hasil Pemilihan Umum., peralihan pemerintahan membawa konsekuensi penyesuaian program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih. Sebagai pelaksana program-program pemerintah, Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai UPT Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit wajib menyesuaikan program-program yang selama ini telah disusun dan dilaksanakan untuk disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih yang akan dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sesuai Permenkes nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke melakukan upaya cegah dan tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menyusun kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran, Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan pada

keawatdaruratan dan situasi khusus, pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan, pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan, pelaksanaan jejaring, koordinasi dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kekarantinaan kesehatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 ini dibuat, dengan harapan semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun mendatang dan juga sebagai bahan dasar dalam membuat Program Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun 2025.

Merauke, 31 Desember 2024
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si.
NIP 197305161997031004

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (Rencana untuk 5 Tahun) yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra Kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja Rencana Aksi Kegiatan (5 Tahun) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Sejalan dengan visi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yaitu “Mewujudkan Pelabuhan, Bandara dan PLBDN yang Bebas dari Penyakit dan Faktor Risiko” dan Misi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yaitu :

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit serta faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dapat mencapai 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke perlu menyusun RKT Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas II Merauke tahun 2025-2029.

B. Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terletak di Jl. Prajurit No. 01 Merauke Provinsi Papua Selatan, berdasarkan struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terdiri dari :

1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
3. Kelompok jabatan fungsional
4. Instalasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka ditetapkan susunan Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan (jabatan fungsional epidemiolog);
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang (jabatan fungsional epidemiolog);
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan (jabatan fungsional entomolog, sanitarian dan jabatan pelaksana);
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus (jabatan fungsional dokter, perawat, analis laboratorium dan jabatan pelaksana) ; dan
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas (jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis dan jabatan fungsional lainnya).

Setiap tim kerja mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. Melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. Melakukan koordinasi anta tim kerja;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
5. Menyusun laporan kegiatan; dan
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Setiap Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, maka dibentuk Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan unit kerja fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137°-141° BT dan 6°-9° LS. Luas Kabupaten Merauke ±45.071 km², sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawan. Secara geografis, berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten :

2. Wilker Pelabuhan laut Bade

Wilker Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Wilker Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Bade 3 (tiga) orang dengan jabatan fungsional entomolog ahli pertama, perawat terampil, dan tenaga kebersihan (outsourcing). Status gedung dan lahan kantor wilker Pelabuhan Laut Bade adalah milik Kementerian Kesehatan.



Gambar 1.4
Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

3. Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Wilker Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Wilker Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Wanam 2 (dua) orang dengan jabatan fungsional perawat pelaksana dan tenaga kebersihan (outsourcing). Status Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam masih berupa sewa gedung/bangunan.



Gambar 1.5 Kantor Pelabuhan Laut Wanam

4. Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Wilker Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD) 4 (empat) orang dengan jabatan fungsional dokter ahli pertama, pranata laboratorium kesehatan terampil, sanitarian pelaksana, petugas kebersihan (outsourcing),

dan petugas keamanan (outsourcing).



Gambar 1.6 Kantor Wilker PLBDN Sota

5. Wilker Pos Lintas Batas Darat Yetetkun

Wilker Pos Lintas Batas Darat Yetetkun berada di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 12 jam dengan jarak tempuh sekitar 524 km. PLBN Yetetkun merupakan perbatasan antara Papua Selatan dengan Papua Nugini. PLBN Yetetkun merupakan salah satu dari beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. PLBN berfungsi sebagai check point di perbatasan negara. Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Yetetkun 1 (satu) orang dengan jabatan fungsional sanitarian ahli pertama.



Gambar 1.7 Kantor Wilker PLBD Yetetkun

6. Pos Bandara Tanah Merah

Pos Bandara Tanah Merah berada di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 8 jam dengan jarak tempuh sekitar 422 km. Sumber Daya Manusia di Pos Bandara Tanah Merah 3 (tiga) orang orang dengan jabatan fungsional sanitarian ahli pertama, perawat terampil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 1.8 Gambar Pos Bandara Tanah Merah

7. Pos Pelabuhan Laut Merauke

Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama $\pm$ 10 menit. Setiap hari petugas dari induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke.

Ga



Gambar 1.9 Gambar pos Pelabuhan Laut Merauke

8. Pos Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, terdapat 2 Maskapai penerbangan Nasional yang beroperasi di Bandara Mopah yaitu : maskapai penerbangan Garuda Air Lines dan Lion Air Lines, disamping itu terdapat Maskapai Trigana Air dengan pesawat sejenis Twin otter/Caravan dan Pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut bahan keperluan TNI dan mengangkut personil militer lainnya. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.



Gambar 1.10 Pos Bandar Udara Mopah

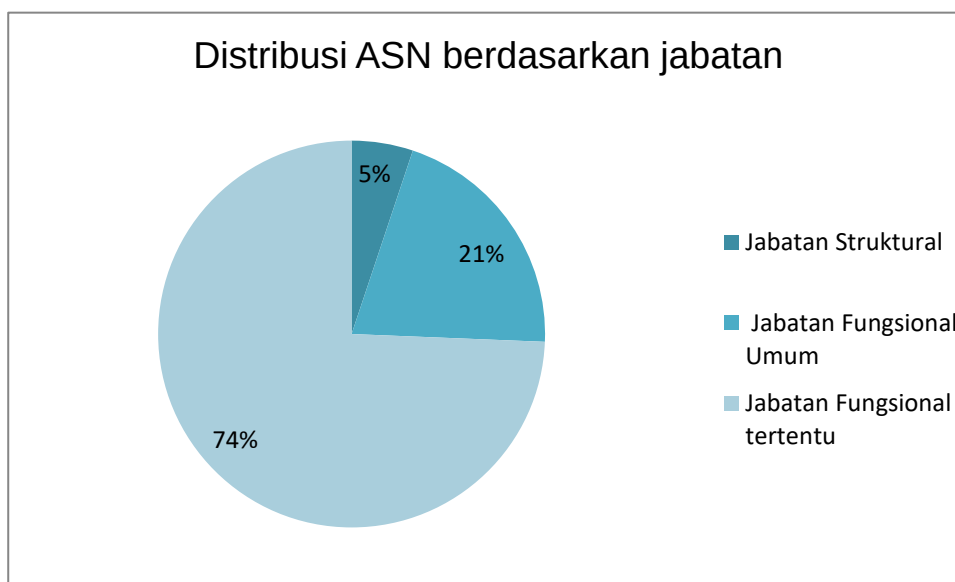
C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke per 31 Juni 2024 sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS: 34 orang, P3K: 5 orang, PPNPN: 1 orang dan outsourcing: 19 orang. Rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

5. Menurut Jabatan

1. Jabatan Struktural : 2 orang
2. Jabatan Fungsional Umum : 8 orang
3. Jabatan Fungsional tertentu : 29 orang



Grafik 1.1 : Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan

6. Tingkat dan Jenis Pendidikan

a. Profesi

- 1) Dokter : 3 orang
- 2) Apoteker : 1 orang
- 3) Ners : 2 orang

b. Strata 2 (S2)

- 1) S2 Ilmu Administrasi : 1 orang
- 2) S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat : 2 orang

3) Strata 1 (S1)

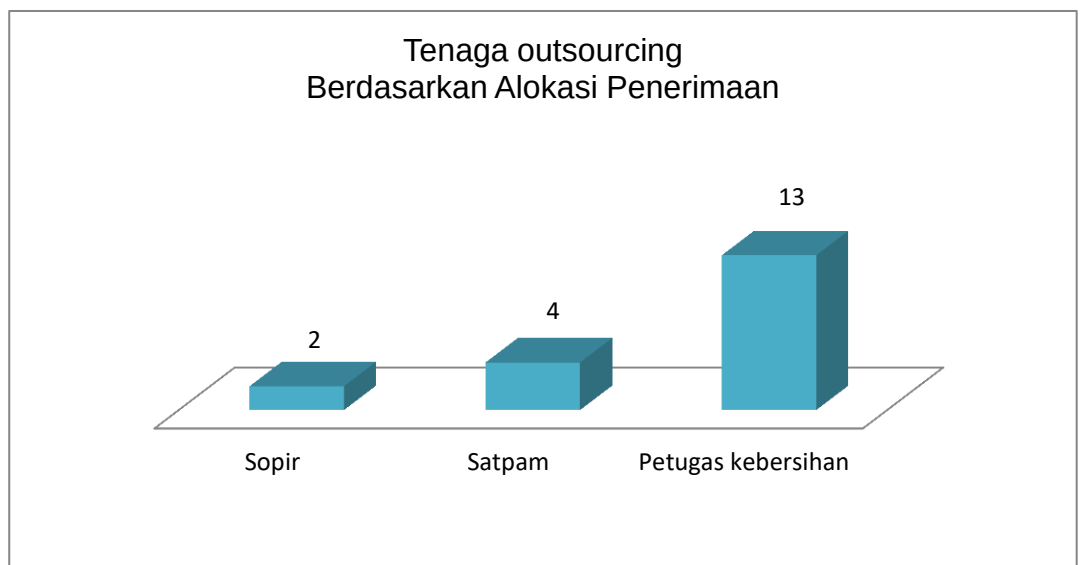
- c. S1 Kesehatan Masyarakat : 9 orang
- d. S1 Ekonomi : 3 orang
- e. S1 Administrasi Negara : 1 orang
- f. D – IV Kesehatan Lingkungan : 1 orang

g. Diploma 3 (D III)

- 1) D – III Analis Kesehatan : 1 orang
- 2) D – III Kesehatan Lingkungan : 5 orang
- 3) D – III Perawat : 7 orang
- 4) D – III Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang
- 5) D – III Manajemen Informatika : 2 orang

7. Rincian Tenaga Outsourcing berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

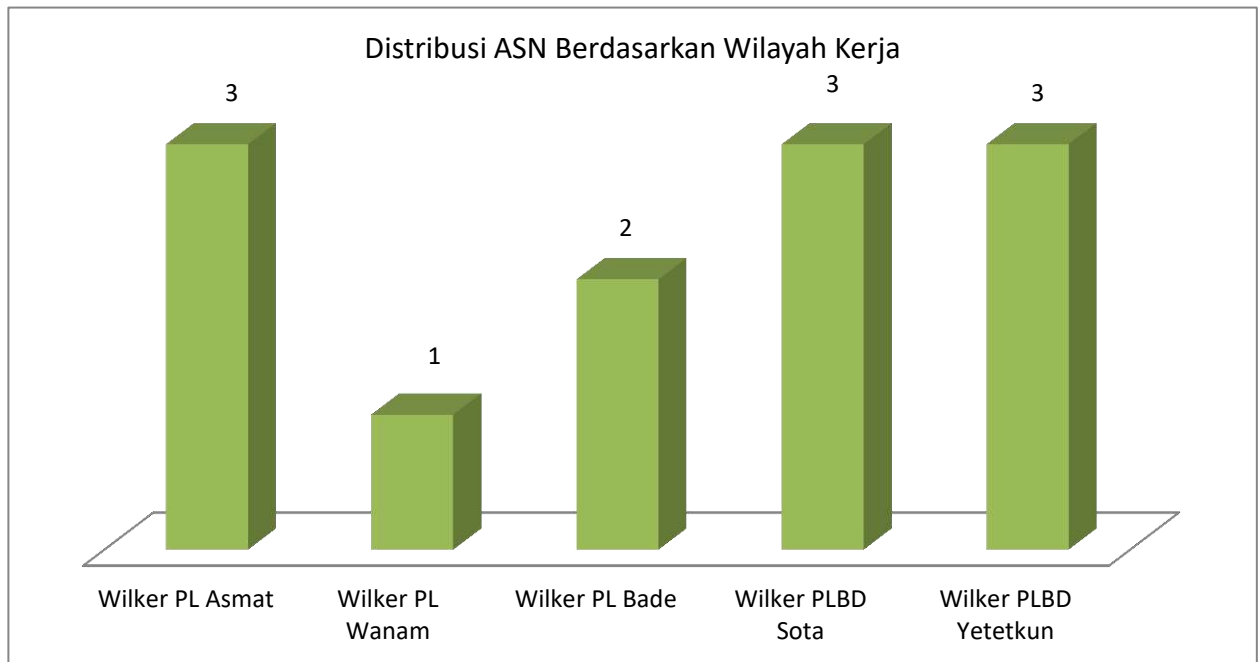
- Sopir : 2 orang
- Satpam : 4 orang
- Petugas kebersihan : 13 orang



Grafik 1.2 Rincian Tenaga Outsourcing Berdasarkan Alokasi Penerimaan

8. Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

- Kantor Induk : 27 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Asmat : 3 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 1 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 2 orang
- Wilayah Kerja PLBD Sota : 3 orang
- Wilayah Kerja PLBD Yetetkun : 3 orang



Grafik 1.3 Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 27 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

9. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 1 orang
- Golongan III/c : 11 orang
- Golongan III/b : 9 orang

- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 5 orang
- Golongan IX : 1 orang
- Golongan VII : 3 orang



Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

10. Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggara upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir ASN dapat dicapai melalui pendidikan formal berupa tugas belajar. Sesuai amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

tersebut, maka Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan perlu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pengembangan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui program pendidikan berkelanjutan diantaranya tugas belajar. Surat Edaran ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan yang memiliki kualifikasi, keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS. Upaya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah mengirimkan pegawai untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar. Tahun 2024 terdapat 1 orang pegawai atas nama Rika Pratiwi yang melakukan tugas belajar di Universitas Hasanuddin peminatan Keperawatan.

D. Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME	JUMLAH	
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			10.857.593.000
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			1.611.897.000
4249.PEA	Koordinasi	3 kegiatan		43.770.000
	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	3 kegiatan	43.770.000	
4249.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	55.0 orang		41.252.000
	Sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	55.0 orang	41.252.000	
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	400 orang		10.200.000
	Pemeriksaan kesehatan masyarakat	400 orang	10.200.000	
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	692 layanan		1.120.768.000
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	7 layanan	238.550.000	
	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	2 layanan		

			62.980.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	96 layanan	84.480.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	24 layanan	21.120.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	80 layanan	128.000.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	35 layanan	42.910.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pes	54 layanan	158.274.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	28 layanan	13.496.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	4 layanan	5.448.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	84 layanan	30.240.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	60 layanan	103.200.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	56 layanan	29.680.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	5 layanan	6.570.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	18 layanan	98.190.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	120 layanan	79.200.000	
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	19 layanan	18.430.000	

4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	2 paket		271.075.000
	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk	2 paket	271.075.000	
4249.TBC	Layanan manajemen SDM internal	7 orang		124.832.000
	Pelatihan kesehatan	7 orang	124.832.000	
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Progran di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			9.245.696.000
4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 unit		31.302.000
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	2 unit	31.302.000	
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 layanan		8.925.964.000
	Layanan BMN	4 layanan	31.140.000	
	Layanan hubungan masyarakat dan informasi	3 layanan	37.290.000	
	Layanan Umum	5 layanan	66.930.000	
	Layanan perkantoran	12 layanan		

			8.790.604.000	
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1 layanan		15.950.000
	Layanan pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P	1 orang	15.950.000	
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 layanan		272.480.000
	Layanan perencanaan dan penganggaran	2 dokumen	108.990.000	
	Layanan pemantauan dan evaluasi	7 dokumen	117.140.000	

E. Sumber Pendanaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO			
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			10.857.593.000
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rupiah Murni	PNBP	1.611.897.000
4249.PEA	Koordinasi			43.770.000
	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	43.770.000		

4249.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi			41.252.000
	Sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	40.875.000	377.000	
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat			10.200.000
	Pemeriksaan kesehatan masyarakat	10.200.000		
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya			1.120.768.000
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	238.550.000		
	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	32.740.000	30.240.000	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	84.480.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	21.120.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	128.000.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	42.910.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pes	158.274.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	13.496.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	5.448.000		

	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	30.240.000		
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	102.000.000	1.200.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare		29.680.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS		6.570.000	
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	98.190.000		
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan		79.200.000	
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	18.430.000		
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			271.075.000
	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk	271.075.000		
4249.TBC	Layanan manajemen SDM internal			124.832.000
	Pelatihan kesehatan	75.852.000	48.980.000	
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Progran di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			9.245.696.000
4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			31.302.000
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	31.302.000		

4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8.925.964.000
	Layanan BMN	31.140.000		
	Layanan hubungan masyarakat dan informasi	37.290.000		
	Layanan Umum	66.930.000		
	Layanan perkantoran	8.790.604.000		
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			15.950.000
	Layanan pendidikan dan pelatihan SDM Ditjen P2P	15.950.000		
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			272.480.000
	Layanan perencanaan dan penganggaran	108.990.000		
	Layanan pemantauan dan evaluasi	117.140.000		
	Layanan manajemen keuangan	46.350.000		
	Jumlah	10.661.346.000	196.247.000	10.857.593.000

F. PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun yang di *break down* dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis. Rencana Kerja Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun pada tahun 2025.

RKT Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama tahun 2025, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya.

Pemantauan pelaksanaan RKT dilaksanakan setiap minggu dan dievaluasi setiap bulan untuk membahas permasalahan yang dihadapi serta tindaklanjut atas permasalahan tersebut. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.